

## Upaya Perbaikan Sistem Politik Sebagai Strategi Pengurangan Silpa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Ramadhani Nurullah Addaru Lail<sup>1</sup>, Komang Yuda Trigopala<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya

Email: [ramadhani.21091@mhs.unesa.ac.id](mailto:ramadhani.21091@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [komangyuda.21058@mhs.unesa.ac.id](mailto:komangyuda.21058@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The remaining budget surplus or Silpa is a fund that is not used up in one budget period. This remaining budget occurs when the realization of an activity budget that has been planned exceeds the budget previously set in the project activity. The political system is power that is obtained by way of organization and is also exercised within a country including certain institutions. In previous studies it was said that the regional government of the City of Yogyakarta experienced problems in terms of budget planning, namely an increase in the remaining excess budget spending caused by the political system. Therefore, this study aims to analyze the improvement of the political system as a strategy for reducing Silpa in the Yogyakarta city government. The method used in this research is a qualitative research approach, namely a multi-case study. Based on the method used, it was found that there were still some defects in the implementation of the Yogyakarta City Regional Government political system which caused an increase in Silpa, so it is necessary to improve the political system used to reduce the occurrence of Silpa.*

### Abstract

Sisa Lebih itungan anggaran atau Silpa merupakan dana yang tidak habis digunakan di dalam satu periode anggaran. Sisa anggaran ini terjadi Ketika lisasi dari sebuah anggaran kegiatan yang sudah direncanakan melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam proyek kegiatan. Sistem politik adalah kekuasaan yang diperoleh dengan cara organisir dan juga dijalankan dalam suatu negara mencakup lembaga-lembaga tertentu. Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa Pemerintah daerah Kota Yogyakarta mengalami problematika dalam segi perencanaan anggaran yaitu peningkatan sisa lebih pembelanjaan anggaran yang disebabkan oleh sistem politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbaikan sistem politik sebagai strategi pengurangan Silpa pada pemerintah kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu studi multi kasus. Berdasarkan metode yang digunakan, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kecacatan dalam penerapan sistem politik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang menyebabkan naiknya Silpa, sehingga perlu perbaikan sistem politik yang digunakan untuk mengurangi terjadinya Silpa.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14739380>

### PENDAHULUAN

Kuangan negara merupakan sebuah definisi yang tertuju pada aspek pengelolaan serta pengaturan Keuangan negara memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah pada suatu entitas publik maupun negara. Semua aktivitas keuangan yang mencakup penerimaan, pengeluaran, serta pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam proses pembuatan anggaran, merupakan bagian dari aktivitas keuangan negara di Republik Indonesia. Keuangan negara menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, keuangan negara juga mencerminkan indikator kondisi ekonomi suatu negara yang berpengaruh pada pertumbuhan dan stabilitas finansial secara keseluruhan (Hutagaol et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

### Article History

Received 29 December, 2024

Revised 30 December, 2024

Accepted 15 January 2025

Available online 19 January 2025

### Keywords :

Political System, SiLPA, Yogyakarta City Government

### Keywords:

Sistem Politik, SiLPA, Pemerintah Kota Yogyakarta

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan dana yang tidak habis digunakan dalam satu periode anggaran tertentu. Sisa anggaran ini terjadi apabila realisasi anggaran untuk sebuah kegiatan yang telah direncanakan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. SiLPA juga dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti perencanaan anggaran yang kurang matang, estimasi biaya yang tidak akurat, anggaran yang berlebih tetapi tidak sepenuhnya digunakan, atau kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Apabila SiLPA mencerminkan inefisiensi dan ketidakmampuan dalam perencanaan anggaran, kondisi ini disebut sebagai SiLPA tinggi. Hal ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran pemerintah (Yuliantoni et al., 2021).

SiLPA yang tinggi dapat menjadi perhatian serius karena mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan negara. Perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, pengawasan yang lemah, dan ketidakmampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien dapat menyebabkan peningkatan SiLPA. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem politik suatu negara juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara. Sistem politik dapat diartikan sebagai mekanisme kekuasaan yang diperoleh melalui proses organisasi dan dijalankan dalam suatu negara. Sistem politik melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang mencerminkan nilai-nilai dan struktur sosial negara tersebut. Setiap sistem politik memiliki karakteristik unik yang menentukan cara negara menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam konteks keuangan negara, sistem politik berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keadilan sosial melalui penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, hak-hak individu dan kebebasan sipil harus dijunjung tinggi untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu permasalahan yang muncul adalah peningkatan SiLPA akibat permasalahan dalam sistem politik. Faktor-faktor seperti perencanaan anggaran yang tidak matang, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat turut berkontribusi terhadap kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan sistem politik yang mencakup peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, penguatan mekanisme pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi SiLPA dan menciptakan sistem politik yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan (Katili & Latuda, 2022).

Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan sistem politik yang baik saling berhubungan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus terus berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi multi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah dalam organisasi. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara rinci dan mendalam untuk memperoleh pemahaman holistik terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber fakta melalui wawancara, observasi, atau dokumen resmi yang relevan. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal, laporan, buku, dan dokumen lain yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen. Peneliti mempelajari berbagai dokumen, laporan, dan arsip dari objek penelitian. Selain itu, data juga diperoleh melalui kajian literatur untuk memperkaya analisis.

Dalam menganalisis data kasus individu, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, di mana proses analisis dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai kejenuhan data. Analisis ini melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berulang.

Analisis lintas kasus dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai kasus untuk menarik kesimpulan yang lebih general. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan perbedaan antar kasus sehingga dapat memperkaya interpretasi data.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui validitas dan reliabilitas. Validitas dicapai dengan triangulasi data, di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi. Sementara itu, reliabilitas diuji dengan memastikan prosedur penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keuangan Negara dan APBN**

Kajian "Fiscal Decentralization and the Size of Government: A Review of the Empirical Literature" oleh Roy Bahl dan Jorge Martinez-Vazquez (2015) membahas pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah dan kualitas keuangan negara. Dalam kajian ini ditemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk memperkecil ukuran pemerintah dan meningkatkan kualitas keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap pengeluaran publik, terutama untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada tata kelola yang baik serta pengurangan praktik korupsi.

#### **The Impact of Fiscal Decentralization on the Performance of the Indonesian State Budget**

Kajian "The Impact of Fiscal Decentralization on the Performance of the Indonesian State Budget: A Historical Overview and Future Prospects" oleh Widjojo Nitisastro (2008) mengkaji dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja APBN, terutama dalam hal peningkatan investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menekankan pentingnya desain kebijakan desentralisasi yang strategis untuk memaksimalkan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Keuangan Daerah dan APBD**

#### **The Impact of Local Government Financing on Urbanization in Indonesia**

Kajian "The Impact of Local Government Financing on Urbanization in Indonesia" oleh Rima Prama Artha (2015) membahas pengaruh keuangan pemerintah daerah terhadap urbanisasi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap urbanisasi, terutama melalui pengeluaran yang ditujukan untuk sektor infrastruktur dan layanan publik. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat mempercepat proses urbanisasi yang sehat dan berkelanjutan.

#### **Analisis Perencanaan APBD dan Implementasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Penelitian "Analisis Perencanaan APBD dan Implementasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah" oleh Slamet Haryadi dan Setiawan Assegaff (2015) mengkaji hubungan antara perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan APBD yang matang dan terstruktur mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam aspek pendapatan dan belanja. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan perencanaan yang berbasis data dan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

## **Sistem Politik dan SILPA Democracy and Development**

Kajian "Democracy and Development: A Complex Relationship" oleh Adam Przeworski (1991) membahas hubungan kompleks antara demokrasi dan pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah politik, budaya politik, dan situasi ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, meskipun demokrasi dapat mendorong pembangunan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memahami konteks lokal agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif.

### **Analisis Peran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Pembangunan Daerah**

Kajian "Analisis Peran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Pembangunan Daerah" oleh Sri Hartini, Evi Yulianti, dan Ahmad Saifuddin (2018) menyoroti peran SILPA dalam pembangunan daerah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa SILPA dapat dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun anggaran sebelumnya. Namun, pemanfaatan SILPA harus disertai dengan perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

## **Sistem Politik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Indikator Meningkatnya SILPA**

### **a. Sistem Birokrasi yang Tidak Efektif**

Birokrasi yang tidak efisien menyebabkan pelaksanaan APBD menjadi lambat. Proses birokrasi yang rumit serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi penyebab utama peningkatan SILPA.

### **b. Kurangnya Komitmen Politik**

Minimnya komitmen politik sering kali disebabkan oleh rendahnya dukungan masyarakat. Program anggaran yang tidak mendapat dukungan politik sering kali mengalami keterlambatan, ketidakstabilan, bahkan terhenti.

### **c. Tidak Adanya Koordinasi yang Baik Antar Lembaga Pemerintah**

Kurangnya koordinasi antar lembaga memperburuk pelaksanaan program anggaran, sehingga meningkatkan risiko SILPA.

## **Sistem Politik yang Efektif dan Efisien dalam Menurunkan SILPA**

### **a. Perencanaan Anggaran yang Matang**

Pemerintah perlu menyusun perencanaan anggaran yang matang untuk meminimalkan risiko kelebihan anggaran.

### **b. Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penting untuk mencegah penyalahgunaan dan mengurangi SILPA.

### **c. Pengawasan yang Ketat**

Pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya SILPA secara lebih efektif.

### **d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran membantu menciptakan akuntabilitas serta efisiensi.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik yang kurang efektif merupakan faktor utama meningkatnya SILPA. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem politik, termasuk peningkatan perencanaan anggaran, transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Dengan

langkah-langkah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat menurunkan angka SILPA dan meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

## REFERENSI

- Alimuddin, A., & Alvia, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pandang Maqasid Syariah Islam pada Masa Harun ar-Rasyid. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01).
- Erdianti, N., & Ramadhan, M. R. H. I. (2023). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Beleid*, 1(1), 1-16.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 419-433.
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 378-385.
- Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 172-182.
- Okfitasari, A., & Widiastuti, A. (2024). KAJIAN DESKRIPSI SUMBER KEUANGAN DAERAH PASKA OTONOMI DAERAH. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2).
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215-220.
- Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Buda*
- Rastana, I. M. S., Mahayasa, I. G. A., & Premayani, N. W. W. (2021). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. *WidyaAmrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan dan Pariwisata*, 1(3), 834-843.
- Ratnasari, D., Meirini, D., & SA, M. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189.
- Rizqiyanto, N., & Al Rahman, A. (2024). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1086-1097.
- Setiawan, H. (2022). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3), 425-445.
- Sisworini, E., Zakaria, A., & Pahala, I. (2024). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia): Studi Kasus pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan
- Suparman, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Talia, N., & Hukom, A. (2024). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palangka Raya. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 461-467.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan



---

Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170-187.